

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP
4. KEGIATAN : 2355 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 06 - Sekretariat Ditjen PSDKP

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		315.974.333,0
01.01	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	81,75	
01.02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92,1	
01.03	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81,5	
01.04	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88,2	
01.05	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,6	
01.06	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	
01.07	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	86	
01.08	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01.09	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,8	
01.10	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	
01.11	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	
01.12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	
01.13	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen. PSDKP	81	
01.14	Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	78	
01.15	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	61	
01.16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	77	
01.17	Nilai implementasi program budaya kerja	71	
01.18	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP	0,5	
01.19	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77	
01.20	Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	3,7	
01.21	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	85	
01.22	Persentase implementasi kerja sama	80	
01.23	Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	
01.24	Nilai pembangunan integritas	77	
01.25	Persentase permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	70	
01.26	Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan SDKP	85	
01.27	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	
Total			315.974.333,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>										315.974.333,0
01.AEC	Kerja sama										460.000,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		460.000,0
	051 - Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										460.000,0
		Pusat	Pusat								460.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										500.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi								000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										304.114.333,0
01.EBA.956	Layanan BMN								000 - Bukan Tematik		370.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Pengelolaan BMN										370.000,0
		Pusat	Pusat								370.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Pengelolaan BMN										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum								000 - Bukan Tematik		270.000,0
	051 - Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan										270.000,0
		Pusat	Pusat								270.000,0
	053 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								000 - Bukan Tematik		800.000,0
	051 - Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat										780.000,0
		Pusat	Pusat								579.200,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								10.700,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								9.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								51.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								10.700,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								9.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.700,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								9.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								17.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								9.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								9.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								26.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								9.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								10.700,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								9.000,0
	054 - Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Penataan Organisasi dan Tata Kelola										300.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								300.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		4.772.500,0
	051 - Layanan umum rumah tangga										4.772.500,0
		Pusat	Pusat								3.372.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								100.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								100.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								100.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								100.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								100.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								100.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								100.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								100.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								100.000,0
	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								0,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								0,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								0,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								0,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								0,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								0,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								0,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								0,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								0,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								0,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								0,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	054 - Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								000 - Bukan Tematik		600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Pengelolaan data dan informasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan Data Pengawasan SDKP										600.000,0
		Pusat	Pusat								600.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	054 - Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum								000 - Bukan Tematik		27.500,0
	051 - Persiapan Bantuan Hukum										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Bantuan Hukum										27.500,0
		Pusat	Pusat								27.500,0
	053 - Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		296.974.333,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										247.546.905,0
		Pusat	Pusat								109.026.881,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								9.435.863,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								11.393.480,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								13.510.311,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								10.210.387,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								11.493.279,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.887.427,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								7.357.355,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								12.062.553,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								6.394.159,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								4.417.712,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								15.173.321,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								7.172.089,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								11.894.652,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								7.117.436,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										49.427.428,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								24.827.428,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								2.500.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								1.650.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								2.300.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								2.900.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.700.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								1.650.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								1.000.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								1.700.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								1.650.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								1.550.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								1.200.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								1.300.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								1.650.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								1.850.000,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1.000.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		800.000,0
	051 - Pengadaan kendaraan bermotor										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
	054 - Penataan Ruang										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Pengadaan prasarana perkantoran										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										3.200.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM								000 - Bukan Tematik		1.000.000,0
	051 - Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
	052 - Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
	053 - Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								003 - Anggaran Responsif Gender		2.200.000,0
	051 - Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP										2.200.000,0
		Pusat	Pusat								2.200.000,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										6.700.000,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran								003 - Anggaran Responsif Gender		2.000.000,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	052 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran										2.000.000,0
		Pusat	Pusat								2.000.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	053 - Fasilitas Revisi Anggaran										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	054 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	055 - Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								000 - Bukan Tematik		800.000,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								000 - Bukan Tematik		1.900.000,0
	051 - Perencanaan Pengelolaan Keuangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	052 - Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan										1.900.000,0
		Pusat	Pusat								1.900.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								000 - Bukan Tematik		1.600.000,0
	051 - Perencanaan Reformasi Kinerja										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP										1.600.000,0
		Pusat	Pusat								1.600.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Pengelolaan Kinerja Pegawai										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
	054 - Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	055 - Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								000 - Bukan Tematik		400.000,0
	051 - Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
Total											315.974.333,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				315.974.333,0				183.719.128,0	184.794.128,0	186.239.128,0
01.AEC	Kerja sama		Kesepakatan		460.000,0				2.850.000,0	2.850.000,0	2.850.000,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Dokumen		460.000,0	4	4	0	2.850.000,0	2.850.000,0	2.850.000,0
01.AEC.001.051	Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0
01.AEC.001.052	Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	460.000,0	0,0	0,0	0,0	2.350.000,0	2.350.000,0	2.350.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AEC.001.053	Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		500.000,0				1.980.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	45	Unit		500.000,0	140	140	140	1.980.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
01.CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0,0	unit	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	1.980.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Perkara		304.114.333,0				138.878.928,0	139.128.928,0	139.378.928,0
01.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		370.000,0	8	8	8	1.425.000,0	1.425.000,0	1.425.000,0
01.EBA.956.051	Perencanaan Pengelolaan BMN	0,0	layanan	0,0	370.000,0	0,0	0,0	0,0	1.025.000,0	1.025.000,0	1.025.000,0
01.EBA.956.052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBA.956.053	Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		270.000,0	1	1	1	970.000,0	1.070.000,0	1.170.000,0
01.EBA.957.051	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.957.052	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan	0,0	Layanan	0,0	270.000,0	0,0	0,0	0,0	770.000,0	870.000,0	970.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBA.957.053	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		800.000,0	3	3	3	1.620.000,0	1.720.000,0	1.820.000,0
01.EBA.958.051	Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.958.052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	780.000,0	0,0	0,0	0,0	1.420.000,0	1.520.000,0	1.620.000,0
01.EBA.958.054	Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		300.000,0	1	1	1	1.000.000,0	1.050.000,0	1.100.000,0
01.EBA.960.051	Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.960.052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	Layanan	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0	850.000,0	900.000,0
01.EBA.960.053	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		4.772.500,0	1	1	1	4.300.000,0	4.300.000,0	4.300.000,0
01.EBA.962.051	Layanan umum rumah tangga	0,0	Layanan	0,0	4.772.500,0	0,0	0,0	0,0	1.400.000,0	1.400.000,0	1.400.000,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan arsip dan persuratan	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.EBA.962.053	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBA.962.054	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		600.000,0	1	1	1	1.300.000,0	1.300.000,0	1.300.000,0
01.EBA.963.051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.963.052	Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	0,0	Layanan	0,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.EBA.963.053	Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
01.EBA.963.054	Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		27.500,0	2	2	2	42.976,0	42.976,0	42.976,0
01.EBA.969.051	Persiapan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
01.EBA.969.052	Pelaksanaan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	27.500,0	0,0	0,0	0,0	32.976,0	32.976,0	32.976,0
01.EBA.969.053	Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		296.974.333,0	1	1	1	128.220.952,0	128.220.952,0	128.220.952,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	0,0	layanan	0,0	247.546.905,0	0,0	0,0	0,0	64.110.476,0	64.110.476,0	64.110.476,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0,0	layanan	0,0	49.427.428,0	0,0	0,0	0,0	64.110.476,0	64.110.476,0	64.110.476,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ Paket		1.000.000,0				7.631.000,0	7.856.000,0	8.151.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	60	Unit		800.000,0	270	276	268	4.881.000,0	5.056.000,0	5.231.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBB.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	0,0	unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0	1.700.000,0	1.700.000,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0,0	unit	0,0	800.000,0	0,0	0,0	0,0	2.681.000,0	2.856.000,0	3.031.000,0
01.EBB.951.054	Penataan Ruang	0,0	unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	6	Unit		200.000,0	24	24	10	2.750.000,0	2.800.000,0	2.920.000,0
01.EBB.971.051	Pengadaan prasarana perkantoran	0,0	unit	0,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	2.750.000,0	2.800.000,0	2.920.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		3.200.000,0				11.115.000,0	10.965.000,0	11.115.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1532	Orang		1.000.000,0	1532	1532	1532	3.765.000,0	3.765.000,0	3.765.000,0
01.EBC.954.051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	0,0	orang	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai	0,0	orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0
01.EBC.954.053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	0,0	Orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365.000,0	365.000,0	365.000,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	319	Orang		2.200.000,0	319	319	319	7.350.000,0	7.200.000,0	7.350.000,0
01.EBC.996.051	Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBC.996.052	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
01.EBC.996.053	Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	150.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Layanan/ Rekomendasi		6.700.000,0				21.264.200,0	22.014.200,0	22.764.200,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen		2.000.000,0	4	4	4	5.099.200,0	5.599.200,0	6.099.200,0
01.EBD.952.051	Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198.400,0	198.400,0	198.400,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	0,0	dokumen	0,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.500.000,0	4.000.000,0
01.EBD.952.053	Fasilitasi Revisi Anggaran	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0	220.000,0	220.000,0
01.EBD.952.054	Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.470.800,0	1.470.800,0	1.470.800,0
01.EBD.952.055	Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210.000,0	210.000,0	210.000,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen		800.000,0	4	4	4	2.800.000,0	2.900.000,0	3.000.000,0
01.EBD.953.051	Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBD.953.052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	800.000,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0	2.200.000,0	2.300.000,0
01.EBD.953.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4	Layanan		1.900.000,0	4	4	4	6.400.000,0	6.450.000,0	6.500.000,0
01.EBD.955.051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0	350.000,0	350.000,0
01.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	0,0	Laporan	0,0	1.900.000,0	0,0	0,0	0,0	5.750.000,0	5.800.000,0	5.850.000,0
01.EBD.955.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan		1.600.000,0	1	1	1	5.500.000,0	5.500.000,0	5.500.000,0
01.EBD.961.051	Perencanaan Reformasi Kinerja	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBD.961.052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	0,0	dokumen	0,0	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
01.EBD.961.053	Pengelolaan Kinerja Pegawai	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
01.EBD.961.055	Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		400.000,0	1	1	1	1.465.000,0	1.565.000,0	1.665.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBD.974.051	Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBD.974.052	Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0	1.265.000,0	1.365.000,0	1.465.000,0
01.EBD.974.053	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
Total					315.974.333,0	-	-	-	183.719.128,0	184.794.128,0	186.239.128,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		315.974.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315.974.333,0
01.AEC	Kerja sama		460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460.000,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460.000,0
01.AEC.001.051	Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.001.052	Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama	460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AEC.001.053	Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		304.114.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304.114.333,0
01.EBA.956	Layanan BMN		370.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.000,0
01.EBA.956.051	Perencanaan Pengelolaan BMN	Pendukung	370.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.000,0
01.EBA.956.052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.053	Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum		270.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270.000,0
01.EBA.957.051	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.052	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	270.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270.000,0
01.EBA.957.053	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBA.958.051	Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.EBA.958.052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	780.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780.000,0
01.EBA.958.054	Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.EBA.960.051	Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.EBA.960.053	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum		4.772.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.772.500,0
01.EBA.962.051	Layanan umum rumah tangga	Pendukung	4.772.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.772.500,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan arsip dan persuratan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.053	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.054	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
01.EBA.963.051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.052	Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	Pendukung	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
01.EBA.963.053	Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.054	Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		27.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.500,0
01.EBA.969.051	Persiapan Bantuan Hukum	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969.052	Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pendukung	27.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.500,0
01.EBA.969.053	Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		296.974.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296.974.333,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	247.546.905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247.546.905,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	49.427.428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.427.428,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBB.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Pendukung	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBB.951.054	Penataan Ruangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.EBB.971.051	Pengadaan prasarana perkantoran	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.EBC.954.051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	Pendukung	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0
01.EBC.996.051	Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996.052	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0
01.EBC.996.053	Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		6.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.700.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.EBD.952.051	Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	Pendukung	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.EBD.952.053	Fasilitasi Revisi Anggaran	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.054	Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.055	Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBD.953.051	Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBD.953.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900.000,0
01.EBD.955.051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	1.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900.000,0
01.EBD.955.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
01.EBD.961.051	Perencanaan Reformasi Kinerja	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	Pendukung	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.961.053	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.055	Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.EBD.974.051	Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974.052	Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.EBD.974.053	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			315.974.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315.974.333,0

Jakarta, 17 Oktober 2025